

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menjelaskan hasil dari proses akuntansi dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan (Munawir, 1991). Setiap pemerintah atau perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu pemerintah atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pelayanan publik yang disediakan pemerintah meliputi pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, dan penyediaan barang publik. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan proses pengadaan yang melibatkan pengadaan barang dan jasa di bawah yurisdiksi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian integral dalam menunjang kegiatan instansi pemerintah yang mendorong pembangunan Indonesia (Dianto, 2023).

Dari berbagai sudut pandang, pembangunan Indonesia tidak terlepas dari perolehan barang dan jasa. Karena pengadaan barang dan jasa memegang peranan penting di sektor publik, terbukti dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tidak jarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan proses pembelian barang dan jasa tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan (Wulandari et al., 2020).

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu proses pertukaran yang terus menerus yang menggunakan sumber daya keuangan suatu perusahaan sebagai alat produksi (capital expenditures) dan dapat menimbulkan kecurangan dan penipuan. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan kegiatan yang rawan mengingat jumlah anggaran yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perwujudan tugas dan fungsi

pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan pendanaannya memerlukan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintah daerah. Masalah umum di lembaga pemerintah dan dunia usaha adalah penipuan. Kecurangan laporan keuangan dan penipuan saat ini banyak dibicarakan di Indonesia, dan penipuan terjadi di banyak bidang kehidupan saat ini (Anggraini et al., 2019).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Asosiasi Pemeriksa Fraud Indonesia (ACFE) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Pencegahan Kejahatan Keras Putih (P3K2P), kasus penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah terkait korupsi. Berdasarkan hasil survei, kasus korupsi menyumbang 67%, pengalihan aset menyumbang 37%, dan penipuan pelaporan keuangan menyumbang 2%. Kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Indonesia memiliki jumlah kasus tertinggi dan korupsi dianggap sebagai penipuan yang paling merugikan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi dan penyelewengan dana yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadi dan merugikan pemerintah. Di Indonesia, banyak terjadi kasus penipuan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dan diyakini bahwa penipuan masih menjadi budaya di berbagai bidang pemerintahan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dikembangkan pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah kecurangan di Indonesia. Penipuan sendiri merupakan suatu penipuan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menguntungkan pihak penipu dan/atau kelompoknya (Padri Achyarsyah, et al, 2020).

Menurut (Anggraini et al., 2019) terdapat dua jenis kesalahan dalam akuntansi yaitu kesalahan dan penipuan. Perbedaan kedua jenis kesalahan ini hanya kecil: kesengajaan. Standar ini juga mengakui bahwa mendeteksi kecurangan seringkali lebih sulit daripada mendeteksi kesalahan, karena manajer dan karyawan berusaha menyembunyikannya.

Kecurangan (Fraud) banyak terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Kecurangan merupakan suatu jenis kegiatan ilegal yang menguntungkan atau

merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Pelaku fraud memiliki beragam motivasi untuk melakukan penipuan ini. Teori segitiga penipuan menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa pelaku fraud melakukan penipuan. Teori segitiga pertama kali dikemukakan oleh Creese (1950). Creese mengatakan ada tiga faktor: 1). Adanya tekanan berkaitan dengan kesengajaan atau dorongan orang tersebut untuk melakukan kecurangan. 2). Peluang, situasi yang memberikan ruang bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kesalahan. 3). Justifikasi (rasionalisasi), yaitu pelaku membenarkan produksi ilegal yang dilakukannya karena meyakini bahwa produksi tersebut salah (Wulandari et al., 2020).

Fraud merupakan suatu kecurangan atau Tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam bidang bisnis dan akuntansi, kecurangan penulisan laporan keuangan sering terjadi. Hal ini merugikan perusahaan dan menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Fraud juga dikenal sebagai kecurangan yang merupakan topik yang hangat diperdebatkan saat ini. Suatu perbuatan kecurangan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan memberikan keuntungan bagi pelakunya. Yang membedakan kedua jenis kesalahan tersebut hanyalah ada tidaknya unsur kesengajaan. Fraud merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling menguntungkan. Penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, biasanya untuk keuntungan bersama. Penyalahgunaan aset mengacu pada penipuan atau pencurian yang melibatkan aset perusahaan oleh karyawan atau orang dalam lainnya dalam suatu organisasi. Kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor yang melakukan audit umum (audit opini) dan didasarkan pada salah saji (kepaluan, berlebihan, terlalu rendah). Kecurangan informasi juga mencakup penipuan dalam penyusunan laporan nonkeuangan, yaitu penyampaian laporan nonkeuangan yang tidak akurat, memutarbalikkan fakta, atau dipalsukan. Dapat dimasukkan dalam dokumen yang digunakan untuk keperluan internal atau eksternal (Anggraini et al., 2019).

Terkait dengan isunya kasus kecurangan pelaporan keuangan pada kantor BKPSDM Majalengka guna proyek bangun serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Majalengka yang merugikan PT PGA, dimana PT PGA telah menyetorkan uang

Rp. 7,5 miliar supaya perusahaannya bisa memenangkan tender proyek tersebut dan adanya beberapa kejanggalan dalam proyek tersebut seperti pemalsuan dokumen hingga pengalaman kerja perusahaannya. Sehingga PT GTA milik Endang memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pemenang proyek bangun guna serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Majalengka pada awal 2022, dengan gagalnya lelang ini ternyata membuka celah kasus korupsi. Hal ini berdampak dan mempengaruhi efektivitas dan kepercayaan masyarakat. Mengingat banyaknya kasus kecurangan pada pelaporan keuangan sehingga diperlukan adanya upaya yang strategis yang tepat dalam mendeteksi, mencegah dan mengungkapkan kecurangan. Pengungkapan kecurangan yaitu suatu proses penemuan mengenai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum demi memperoleh keuntungan, yang dilakukan dengan menyembunyikan fakta atau penipuan. Pengungkapan fraud dan korupsi tidak hanya diungkapkan oleh KPK namun bisa dibantu diungkapkan oleh auditor yang akan melakukan suatu penyelidikan. Diperlukan auditor yang memiliki kemampuan untuk mengungkap fraud yang terjadi (Fauzan, Purnamasari, et al., 2014).

Pengungkapan kecurangan tidaklah mudah, harus melalui beberapa prosedur pengumpulan bukti yang kuat. Dalam penelitian ini menggunakan 2 faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan fraud yaitu akuntansi forensik dan audit investigatif. Dalam kondisi seperti sekarang ini penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif sangat diperlukan dalam upaya pendeteksian fraud, hal ini tidak terlepas dari semakin pesatnya perkembangan *fraud* dari hari ke hari. Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi nyata dari akuntan dalam melawan fraud. Dalam hal ini, akuntan dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih maju di bidang akuntansi, yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, manajemen bisnis, teknologi informasi dan tentunya bidang hukum. Akuntan forensik memainkan peran yang efektif dalam menyelesaikan kejahatan. Akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk penyelidikan permasalahan hukum untuk penyelesaian hukum di dalam dan di luar pengadilan (Tuanakotta, 2009). Dengan cara ini, dapat dilakukan upaya untuk meminimalisir korupsi dan pelanggaran

lainnya yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan, serta memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntansi forensik merupakan praktik khusus di bidang akuntansi yang memperhitungkan keterlibatan dalam perselisihan atau litigasi yang sebenarnya atau yang diantisipasi (Harvarindo, 2012). Akuntansi forensik merupakan upaya untuk mendeteksi kecurangan pada organisasi sektor publik dan seni memeriksa catatan akuntansi, laporan keuangan, dan dokumen keuangan terkait lainnya. Menurut (Arianto, 2021), ruang lingkup akuntansi forensik meliputi akuntansi, audit, dan hukum, sehingga akuntansi forensik dapat dipadukan dengan keterampilan investigasi untuk menyelesaikan masalah keuangan, termasuk pendeteksian berbagai bentuk penipuan kegiatan deteksi. Peran Fakta-fakta yang terjadi dijadikan dasar dan bukti berbagai kejahatan. Namun akuntansi forensik berfungsi untuk mengetahui sejauh mana seorang tersangka merupakan pelaku dan menyajikan bukti-bukti yang diperoleh melalui penerapan akuntansi forensik di pengadilan (Arianto, 2021).

Penelitian yang berkaitan dengan akuntansi forensik dalam pengungkapan kecurangan laporan keuangan (fraud) sudah dilakukan dalam peneliti sebelumnya. Seperti peneliti yang berpendapat bahwa akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pada laporan keuangan yakni penelitian yang dilakukan oleh (Padri Achryansyah, et al., 2020) pada artikel jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada BPK Republik Indonesia)”. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Wahyuadi Pamungkas, et al., 2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Pada Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)” menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh pada pengungkapan fraud.

Penerapan disiplin akuntansi forensik memerlukan pengetahuan tentang audit investigatif, berdasarkan mana auditor dapat menyimpulkan pertanyaan apa, bagaimana, siapa, dan lainnya yang mungkin relevan untuk mendeteksi penipuan (Fauzan et al. 2014). Suatu bentuk audit dan investigasi yang bertujuan untuk

menemukan atau mendeteksi penipuan atau kejahatan melalui pendekatan, prosedur, atau berbagai teknik yang biasa digunakan dalam penyelidikan dan investigasi penipuan. Audit investigatif mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti terkait kasus-kasus penipuan yang terbukti berdampak negatif terhadap keuangan negara dan perekonomian negara guna menarik kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan perbaikan manajemen. Penelitian yang dilakukan (Andriani, 2018), (Wuysang et al., 2016), (Achyarsyah et al., 2018) menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Karena audit investigatif mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit investigatif serupa dengan yang digunakan dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan khusus lainnya yang digunakan relatif berbeda (Putra et al., 2017). Penelitian terkait audit investigatif untuk mengungkapkan laporan keuangan yang mengandung kecurangan (fraud) berasal dari (Ardiansyah, 2023) yang menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wahyuadi Pamungkas, et al., 2022) menyatakan bahwa audit investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraud) Pada BKPSDM Majalengka**”.

Dengan memahami pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan , diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi praktik akuntansi dan audit saat ini.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya kasus korupsi proyek bangun guna serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Majalengka.
2. Adanya kegagalan dalam proyek seperti pemalsuan dokumen hingga pengalaman kerja perusahaan.

3. Adanya kasus pemerasan kepada seorang pengusaha PT PGA hingga mencapai Rp. 7,5 miliar.
4. Adanya modus yang dilakukan oleh Andi Nurmawan untuk memenangkan PT PGA dalam pelelangan proyek bangun guna serah Pasar Sindangkasih, Cigasong, Majalengka.
5. Adanya hambatan dalam proyek yang belum dieksekusi dari tahun 2020 sampai tahun 2021.
6. Adanya kesalahan informasi dalam Peraturan Bupati Majalengka yang merujuk Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Arsan Latif yang memiliki peran lebih paham dalam aturan di ranah kemendagri bahwa perusahaan calon mitra tidak harus yang telah memiliki pengalaman, tapi dibolehkan berafiliasi dengan perusahaan lain yang punya proyek yang ditentukan. Tapi ternyata, di draf Peraturan Bupati Majalengka yang merujuk Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 persyaratan yang tercantum belum memuat tentang istilah afiliasi itu.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini memfokuskan pada faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengungkap fraud yaitu akuntansi forensik dan audit investigatif pengungkapan fraud.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari kantor BKPSDM Majalengka

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan (fraud)?
2. Apakah audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan (fraud)?

3. Berapa besar pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan terhadap pengungkapan pelaporan kecurangan keuangan pada kantor BKPSDM Majalengka?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis akuntansi forensik berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan (fraud).
- b. Untuk menganalisis mengetahui audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan (fraud).
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif secara simultan terhadap pengungkapan kecurangan pelaporan keuangan pada kantor BKPSDM Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Regulasi (Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh akuntansi forensik dan auditing investigatif terhadap pengungkapan kecurangan laporan keuangan (Fraud).

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, untuk pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan yang instansi pemerintah atas nama aparat pemerintahan dan memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut masukan mengenai pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif pada pengungkapan kecurangan laporan keuangan (fraud).

- c. Manfaat untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu dibidang akuntansi, menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori serta referensi yang berguna bagi peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan kecurangan laporan keuangan (fraud).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan pada skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan secara ringkas, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini membahas mengenai kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori dan hipotesis teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi jenis penelitian, sumber data, penentuan populasi, dan sample penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis dari rumusan masalah yang telah diuraikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan pada bab empat tentang hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.